BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar : KOMPAS
Subyek : Cagar Biosfer
Edisi : 19 APRIL 2008
Hari : SABTU
Hal. : 13

Cagar Biosfer di Mentawai Berubah Menjadi HPH

Padang, Kompas - Departemen Kehutanan mengeluarkan izin hak pemanfaatan hutan atau HPH atas nama PT Salaki Summa Sejahtera di kawasan cagar biosfer Siberut Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat.

Pihak Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) meminta agar pemberian izin ini ditinjau kembali oleh pemerintah karena bisa merusak kehidupan di tempat itu.

Menteri Kehutanan MS Kaban, Kamis (17/4) malam, menjamin, izin yang diberikan untuk PT Salaki Summa Sejahtera (SSS) tidak akan mengganggu fungsi hutan di kawasan itu sebagai cagar biosfer.

”Walaupun sebagai cagar biosfer, fungsi-fungsi produksi hutan tetap bisa dilaksanakan. Secara alamiah, kawasan hutan perlu ada peremajaan,” kata Kaban seusai acara pelantikan DPC Partai Bulan Bintang Kota Padang. Sebelumnya Kaban meninjau lokasi hutan di Mentawai.

PT SSS mengantongi izin HPH untuk kawasan hutan di Siberut Utara seluas sekitar 49.000 hektar. Dari total luas tersebut, terdapat sekitar 4.000 hektar areal untuk cagar biosfer.

Kaban mengatakan telah melakukan pemetaan kawasan di areal tersebut untuk menentukan batas-batas wilayah yang boleh dirambah dan tidak.

Diawasi masyarakat

Dia juga menjamin pelaksanaan HPH oleh PT SSS tidak akan mengganggu kelestarian hutan di kawasan itu. Pengawasan atas perambahan hutan oleh PT SSS akan dilakukan LSM, perguruan tinggi, dan LIPI.

”Pengelolaan HPH ke depan harus memerhatikan kelestarian lingkungan, termasuk aspek konservasi satwa-satwa yang dianggap langka di Mentawai,” ujar Kaban.

”Saya juga akan melakukan kunjungan lagi ke Mentawai serta pemantauan dari udara atas kondisi hutan di Mentawai. Kalau memang ada yang melanggar ketentuan, bisa saja kita tempuh jalur hukum dan dilakukan pencabutan izin,” ujarnya.

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup

Tinjau kembali

Di tempat terpisah, Direktur Walhi Sumatera Barat Khalid Syaifullah mengatakan, pemberian izin HPH di Siberut perlu ditinjau lagi karena mengganggu kelestarian hidup masyarakat di kepulauan tersebut secara keseluruhan.

”Pulau seperti Siberut dan kepulauan lain di Mentawai bergantung pada hutan untuk mendapatkan cadangan air bersih. Kalau hutan sudah dirambah, cadangan air bersih untuk masyarakat juga terancam,” kata Khalid.

Selain itu, pembukaan hutan menyebabkan sedimen tanah yang terbawa air hujan juga semakin banyak yang mengalir ke sungai. Hal ini akan berdampak juga pada terganggunya sungai yang menjadi sumber pemenuhan kebutuhan air masyarakat.

Di sisi lain, Khalid melihat ada ancaman atas Taman Nasional Siberut yang terletak di sisi areal HPH PT Salaki Summa Sejahtera. Dari pengalaman sebelumnya atas pemberian izin HPH di sekitar lokasi tersebut, areal Taman Nasional Siberut juga ikut terambah karena ada perpotongan daerah hutan.

Pengalihan lahan hutan telah menjadi persoalan nasional yang diprihatinkan banyak pihak. Kasus terakhir adalah ditangkapnya anggota DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Amin Nasution. Dia ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi, minggu lalu, akibat dugaan terlibat kasus suap yang melibatkan Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan Azirwan untuk perkara pengalihan status fungsi hutan lindung di Pulau Bintan.

Perkara tersebut merupakan satu dari sejumlah persoalan terkait dengan status hutan lindung. Hutan lindung selama ini selalu menjadi sumber konflik antara investor dan masyarakat. (ART)

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup